



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ATQO MARDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 65447

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m<sup>2</sup>/110 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1405 m<sup>2</sup>/300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 3500 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 380.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOBIL, MIRAGE SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 145.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 600.170.798**F. HARTA LAINNYA** Rp. 26.000.000

**Sub Total** Rp. 3.626.170.798



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.626.170.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.